

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan perekat persatuan bangsa. Dalam Indeks Pariwisata Indonesia Tahun 2018, sektor pariwisata pada tahun 2018 mampu memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4,5 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 4,8 persen, sedangkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2018 tercatat mencapai 19,29 miliar dolar AS atau hampir menembus target pada tahun 2019 sebesar 20 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia menargetkan sektor pariwisata pada tahun 2019 mampu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara serta wisatawan nusantara sebesar 275 juta orang, mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 12,6 juta orang, serta indeks daya saing pariwisata berada pada peringkat 30 dunia.

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian daerah karena sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap

Pendapatan Asli daerah (PAD). Menurut Warsito (2011:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kota Semarang tercatat sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, PAD Kota Semarang mencapai Rp 1,72 triliun pada 2018 atau sekitar 13% dari total PAD 35 Pemkab/Pemkot di Jateng. Nilai PAD tersebut terdiri atas pajak daerah Rp 1,2 triliun, retribusi daerah Rp 107,69 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 42,5 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 367,85 miliar.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi menaruh perhatian pada realisasi pajak Kota Semarang yang selama ini didominasi oleh pajak non-produktif, yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), serta PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) (dikutip dari http://semarangkota.go.id/p/592/hendi_sukses_dorong_pajak_sektor_wisata_jadi_modal_pembangunan). Menurutnya, ini berarti masih banyak sektor yang belum tergarap di Kota Semarang, yang kemudian bila dapat didorong pengembangannya maka akan mampu meningkatkan pembangunan salah satunya yaitu, sektor pariwisata. Rata-rata kontribusi sektor pariwisata dalam penerimaan PAD Kota Semarang setiap tahunnya sebesar 0,40%. Namun, angka pertumbuhannya masih dikatakan fluktuatif dan bahkan menurun pada

tahun 2014 dan 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Semarang

Tahun	PAD Kota Semarang	Penerimaan Sektor Pariwisata	Prosentase Kontribusi	Angka Pertumbuhan
2013	930.577.133.513	5.568.807.000	0,59%	-0,17%
2014	1.158.137.854.383	4.880.453.350	0,42%	
2015	1.244.594.020.738	4.995.301.700	0,40%	-0,02%
2016	1.337.039.529.000	5.914.603.300	0,44%	+0,04%

Sumber: Data diolah dari Bab 3 LKPJ Kota Semarang Tahun 2013-2016

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan pariwisata tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada misi ke-4 (empat), yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal yang Membangun Iklim Usaha yang Kondusif” dengan sasaran “Meningkatkan Daya Tarik Wisata (DTW)”. Strategi pencapaian yang dilakukan adalah penguatan dan pengembangan sektor unggulan dengan arah kebijakannya adalah peningkatan pengelolaan kepariwisataan melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan pengelolaan obyek serta kemitraan kepariwisataan. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Semarang fokus untuk menggarap sektor pariwisata dengan merevitalisasi sejumlah objek serta kawasan wisata di Kota Semarang yang sebelumnya belum optimal dibangun, seperti merevitalisasi Kota Lama, Hutan Wisata Tinjomoyo, inisiasi ratusan Kampung Tematik, hingga revitalisasi Banjir Kanal Barat melalui pembangunan Semarang Bridge Fountain.

Tabel 1.2
Perkembangan Daya Tarik Wisata di Kota Semarang

No	Obyek Wisata	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Obyek Wisata Alam	5	5	5	6
2.	Obyek Wisata Budaya	11	11	11	11
3.	Obyek Wisata Buatan	10	10	10	12
4.	Minat Khusus	-	-	-	-
5.	Lain - Lain	10	12	14	14
	Jumlah	36	38	40	43

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2015 - 2018, (2018)

Berdasarkan tabel 1.2, daya tarik wisata di Kota Semarang dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2015, Kota Semarang hanya memiliki 36 Daya Tarik Wisata, tahun 2016 menambah 2 obyek wisata baru sehingga total menjadi 38 obyek wisata. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan masing - masing menjadi 40 obyek wisata dan 43 obyek wisata tahun. Obyek wisata yang beragam membuat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dalam empat tahun terakhir meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Kota Semarang

Tahun	Wisman	Presentase Pertumbuhan	Wisnus	Presentase Pertumbuhan	Total
2015	16.518	-	2.853.564	-	2.870.082
2016	101.756	516%	3.023.441	5,9%	3.125.197
2017	99.282	-2,43%	4.198.584	38,86	4.297.866
2018	66.107	-33,41%	5.703.282	35,84%	5.769.389

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah 2015 - 2018, (2018)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhannya masih dikatakan fluktuatif dan bahkan menurun bagi perkembangan wisatawan mancanegara. Contohnya pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis sebesar 33,41% menjadi hanya 66.107 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota

Semarang. Di sisi lain, terjadi tren positif bagi perkembangan wisatawan Nusantara di setiap tahunnya. Kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang tidak lepas dari ketertarikan pada obyek wisata yang ada.

Salah satu obyek wisata yang ada di Kota Semarang adalah desa wisata. Semarang yang tergolong sebagai kota besar dan ibukota Provinsi Jawa Tengah mempunyai 8 (delapan) desa wisata, yaitu antara lain Desa Wisata Nongkosawit, Desa Wisata Wonolopo dan Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Kedungpane, Desa Wisata Purwosari, Desa Wisata Tugurejo, Desa Wisata Cepoko, Desa Wisata Jatirejo dan beberapa desa wisata rintisan. Menurut Dinas Pariwisata Kota Semarang, Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata, diantaranya penduduknya masih memiliki tradisi, budaya yang relatif masih asli, serta beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan Desa Wisata. Faktor alam dan lingkungan yang masih asli dan fasilitas yang menunjang juga sebagai salah satu faktor penting kawasan tujuan wisata.

Desa Wisata Kandri ditetapkan melalui Surat Keputusan Waikota Nomor 556/407 tahun 2012 Tentang Penetapan Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Sebagai Desa Wisata Kota Semarang. Kandri berstatus sebagai kelurahan namun dalam pengembangan wisata disebut sebagai Desa Wisata Kandri. Desa Wisata Kandri bermula dari dibangunnya sebuah waduk yang menenggelamkan kawasan pertanian dan membuat warga Kelurahan Kandri kehilangan sebagian mata pencahariannya sebagai petani. Namun, hal tersebut justru membuat

dampak positif bagi warga karena selain fungsi waduk sebagai penampung air, juga mempunyai fungsi lain sebagai obyek dan daya tarik wisata buatan. Hal ini kemudian dijadikan peluang usaha dengan memberdayakan perekonomian kreatif masyarakat melalui usaha pariwisata dengan membentuk desa wisata yang berbasis masyarakat. Akibatnya kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kandri mengalami peningkatan yang dapat dilihat di tabel bawah ini.

Tabel 1.4
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Desa Wisata Kandri

Tahun	Wisnus	Wisman	Jumlah	Pendapatan Kotor
2014	1270	25	1295	84.175.000
2015	3392	36	3428	257.100.000
2016	6787	72	6859	857.375.000
2017	8767	96	8873	1.067.160.000
2018	12034	91	12125	1.455.000.000

Sumber: Profil Desa Wisata Kandri, (2019)

Dilihat dari tabel 1.4, dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang datang ke Desa Wisata Kandri terus meningkat dan menunjukkan tren positif. Meningkatnya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun tentu membuat Desa Wisata Kandri terus maju baik dari segi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakatnya.

Kelurahan Kandri atau Desa Wisata Kandri terletak di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Desa Wisata Kandri memiliki luas wilayah sebesar 245,490 ha dan terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT). Setiap RW memiliki potensi masing-masing. RW I atau Dusun Kandri sebagai wisata edukasi beternak bercocok tanam, dan terdapat pula sendang, yaitu sendang jambu dan sendang gede, RW II atau Dusun Siwarak sebagai wisata untuk area perkebunan dan dilengkapi dengan aneka buah, RW III atau Dusun Talun Kacang yang menjadi tujuan wisata seni budaya dan alam

serta dekat dengan Goa Kreo dan Waduk Jatibarang, sedangkan RW IV atau Perum Kandri Pesona Asri yang menjadi tujuan wisata aquaponik.

Desa Wisata Kandri memiliki potensi baik alam, pertanian, perkebunan kerajinan, kuliner, budaya dan lain sebagainya, antara lain:

- 1) Memiliki lahan persawahan dan perkebunan yang dimanfaatkan sebagai wisata *outbound* atau *fieldtrip*;
- 2) Terdapat beberapa sendang, yaitu Sendang Gede, Sendang Jambu, Sendang Pancuran, dan Sendang Gawe. Setiap sendang dipercaya memiliki khasiat masing-masing seperti untuk penyembuhan penyakit;
- 3) Kandri Etnic merupakan tempat yang menyediakan berbagai produk karya seniman muda yang mencintai budaya dan potensi Desa Wisata Kandri;
- 4) Omah Pohong merupakan salah satu UMKM di Desa Wisata Kandri yang berfokus pada olahan pangan dari singkong yang diolah menjadi aneka makanan yang unik dan berbeda dari olahan singkong lainnya;
- 5) Omah Alas adalah tempat untuk memperkenalkan budaya jawa atau nguri-guri budaya jawa yang dilengkapi dengan *outbond*. Wayang Dakwah merupakan salah satu hasil budaya yang dikembangkan oleh Omah Alas Desa Wisata Kandri;
- 6) Kawasan Wisata Goa Kreo adalah sebuah Goa yang dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat beristirahat usai mencari kayu jati dari Jatingaleh untuk pembangunan Masjid Demak;
- 7) Desa Wisata Kandri juga menyediakan fasilitas *homestay*.

Desa Wisata Kandri awalnya mempunyai 1 (satu) pokdarwis yaitu Pokdarwis Pandanaran yang anggotanya terdiri dari RW 1 hingga RW 4.

Namun, pada tahun 2014 muncul pokdarwis baru bernama Pokdarwis Suko Makmur yang sebagian besar pengurusnya adalah masyarakat RT 05 RW III. Pokdarwis Suko Makmur menawarkan wisata air menggunakan perahu untuk mengelilingi Waduk Jatibarang. Sementara, Pokdarwis Pandanaran terus mengoptimalkan wisata edukasi berternak, bercocok tanam dan budaya. Adanya konflik kelembagaan pengelolaan Desa Wisata Kandri karena perbedaan pendapat antara Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Suko Makmur sempat menimbulkan ketidakharmonisan, tidak adanya kerjasama ataupun koordinasi yang baik.

Desa Wisata Kandri terus melakukan inovasi produk wisata atau atraksi wisata serta pemenuhan fasilitas sarana prasarana penunjang. Pokdarwis Pandanaran sebagai salah satu pengelola yang memiliki peran penting dalam perkembangannya mulai dari awal perintisan hingga sekarang. Hal yang dilakukan antara lain menyediakan produk wisata seperti *river tubing*, wisata edukasi seperti menanam padi, menangkap lele, menanam dan memanen singkong, menyediakan *homestay*, dan masih banyak lagi. Pokdarwis Pandanaran juga mengadakan *event* budaya tahunan seperti Sesaji Rewandha, Nyadran Sendang, dan Nyadran Kubur.

Perkembangan Desa Wisata Kandri membawa banyak prestasi dan penghargaan yang diterima. Salah satunya yaitu Desa Wisata Kandi sebagai Juara Umum Festival Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2018 yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disproapar) Jawa Tengah. Pokdarwis Pandanaran sebagai salah satu pengelola Desa Wisata Kandri juga menerima penghargaan sebagai Juara Umum Lomba Apresiasi Pokdarwis Kota

Semarang Tahun 2017 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang dan Juara III Jambore Pokdarwis Jawa Tengah Tahun 2018 yang diadakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disproapar) Jawa Tengah.

Pengembangan Desa Wisata Kandri terus dilakukan dengan melibatkan aktor/*stakeholders* lain. Kemitraan atau kerjasama dijalin dengan beberapa pihak, antara lain dengan pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Pemerintah berperan dalam hal pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi penunjang baik fisik maupun non fisik. Kemitraan yang melibatkan aktor non pemerintah sebagian besar adalah lewat pemberian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh mitra swasta kepada masyarakat Desa Wisata Kandri. Beberapa pihak swasta, diantaranya adalah PT Pertamina MOR IV Jateng dan DIY dan PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Kemitraan dengan perguruan tinggi juga dilakukan dan berfokus pada kegiatan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) atau pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan pelatihan maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN). Perguruan Tinggi yang pernah bermitra dengan Desa Wisata Kandri antara lain Universitas Negeri Semarang, Unika Soegijapranata, Universitas Diponegoro, UIN Walisongo, dan Politeknik Negeri Semarang.

Pengembangan Desa Wisata Kandri juga mengalami kendala seperti keterbatasan lahan, terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, pola pikir, peraturan, kegiatan promosi, dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh penelitian Isnaningtyas (2017) yang berjudul Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang mengatakan bahwa minimnya peran *stakeholder* kepariwisataan dalam mengembangkan desa wisata, belum terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pokdarwis dan masyarakat, serta kemitraan yang diberikan pihak swasta sebagian besar melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat melalui pokdarwis. Penelitian yang dilakukan oleh Tofan dkk (2014) dalam judul Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang juga menghasilkan bahwa di dalam mengembangkan Desa Wisata Kandri ada beberapa hal kendala yang dihadapi, yaitu keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai, perlunya pelatihan khusus untuk personil di lapangan, keterbatasan anggaran dari Pemerintah, sarana dan prasarana kurang memadai, media informasi masih minim, dan masyarakat tidak ingin bekerjasama dengan pihak luar. Banyaknya aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri juga membuat kompleksitas permasalahan dalam jaringan aktor yang terbentuk seperti perbedaan pendapat, tumpang tindih peran, komunikasi yang tidak lancar, atau keterbatasan biaya/SDM dalam kemitraan.

Kesinergisan antara aktor dalam pengembangan desa wisata merupakan hal yang penting untuk diciptakan. Eksistensi, dampak, dan jaringan yang terbentuk akan mempengaruhi bagaimana upaya tersebut dapat berjalan lancar. Keterlibatan aktor dalam jaringan dapat diulas dengan menggunakan beberapa teori dalam Ilmu Administrasi Publik, salah satunya adalah teori jaringan aktor (*Actor Network Theory*).

Menurut Simanjuntak (2015:44) aktor adalah semua elemen yang terkait oleh ruang, membuat elemen lain terikat dan mengubah keinginannya menjadi kenyataan. Callon dan Latour dalam Yuniningsih (2018) mengatakan setiap aktor mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga berusaha meyakinkan aktor lainnya untuk menyelaraskan dengan kepentingan sendiri. Ketika proses persuasif menjadi efektif, lalu menghasilkan *actor network*, yang berarti jaringan aktor terbentuk ketika tercipta kesepakatan antara satu aktor dengan aktor lainnya melalui proses meyakinkan aktor lainnya bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama atau kepentingan aktor lainnya digabungkan menjadi satu misi baru dengan mengumpulkan kekuatan dan diamanatkan pada aktor utama agar kepentingannya dapat tersampaikan dan tercapai. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama namun memungkinkan juga terjadi dengan waktu yang sangat pendek.

Teori jaringan aktor (*Actor Network Theory*) akan mencoba mengeksplorasi hubungan relasional antar aktor khususnya dalam penelitian ini mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi aktor yang terlibat hingga menganalisis bagaimana peran aktor, tahapan jaringan aktor yang terbentuk serta faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Analisis Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kendala dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, yaitu keterbatasan lahan, terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, pola pikir, peraturan, kegiatan promosi, dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan.
2. Banyak aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sehingga terjadi kompleksitas permasalahan.
3. Belum jelas siapa saja dan apa peran aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.
4. Konflik yang terjadi antara Pokdarwis Pandanaran dan Pokdarwis Suko Makmur.

1.3 Rumusan Masalah

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri?
2. Bagaimana peran aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri?
3. Bagaimana tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.
2. Menganalisis peran aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

3. Menganalisis tahapan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.
4. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya mengenai Kebijakan Publik dan Jaringan Aktor.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan berfikir yang diperoleh di lapangan dan menerapkan pengetahuan tersebut di kehidupan dan lingkungan sekitar.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan Desa Wisata Kandri.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang penulis angkat dalam tulisan ini maka penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sehingga dapat memperkaya teori serta bahan kajian pada tulisan ini. Dari penelitian terdahulu, penulis hingga saat ini belum menemukan penelitian dengan

judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut ini merupakan beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian dengan judul Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang oleh Fitri Handayani dan Hardi Warsono pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa untuk pengembangan wisata terdapat *stakeholders* primer, kunci dan sekunder dimana ketiganya mempunyai peran penting yang saling sinergi antara satu dan lainnya. Ada beberapa faktor yang menghambat *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata yaitu lahan, anggaran, sumber daya manusia dan kerjasama antar *stakeholders*.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang disusun oleh Yosevita Th. Latupapua dengan judul Implementasi Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Manusela (Tnm) Di Kabupaten Maluku Tengah menggunakan indikator yang sama dalam menentukan stakeholders. Penelitian ini menggunakan teori Maryono et al (2005) dimana stakeholder dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu, Stakeholder primer, Stakeholder kunci, dan Stakeholder pendukung (sekunder). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian Aji Winara dan Abdullah Syarief Mukhtar ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam indikator penentuan stakeholders. Penelitian dengan judul Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Papua menggunakan teori menurut Meyers

(2001) dan Permenhut nomor P.19/ Menhut-II/2004 yang dilakukan melalui tahapan, yaitu pembobotan pada setiap lembaga pemangku kepentingan dan pengelompokan setiap lembaga yang berada pada skala bobot nilai penting dilakukan dengan bantuan matrik kuadran. Penelitian ini menghasilkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan terhadap obyek wisata yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Terdapat peran positif para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan obyek wisata namun belum membentuk sinergi, sehingga sistem kolaborasi potensial untuk diterapkan dalam pengelolaannya.

Selanjutnya penelitian oleh Muhammad Tofan, Ari Subowo, dan Maesaroh pada tahun 2014 dengan judul Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori analisis SWOT, memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) dari pengembangan obyek Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menghasilkan Penelitian strategi ini berdasarkan analisis lakmus ada enam isu strategis: Membangun fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengembangan objek wisata berkualitas, peningkatan strategi promosi peningkatan koordinasi antara masyarakat lokal dengan dinas pariwisata dan pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuniningsih, Titi Darmi, dan Susi Sulandari dengan judul Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang pada tahun 2019 mendukung penelitian yang dilakukan penulis dalam menentukan indikator aktor. Peneliti menggunakan teori Aktor Kebijakan menurut Howlett dan Rames (1995) (dalam Suwitri, 2011), yaitu *elected officials*, *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk, *interest group*, *research organization*, dan media massa. Teori kedua yang digunakan yaitu teori Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (lima unsur), yaitu: *Academician*, *Business*, *Community*, *Government* dan *Media*. Dari penelitian dapat diketahui bahwa pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model pentahelix, sudah melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa

Selaras dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang disusun oleh Zaleha Mohamad et al dengan judul *A role of multiple stakeholder towards sustainable tourism in Setiu wetlands*. Pendekatan penelitian ini adalah metode kuantitatif yang melibatkan 120 responden. Peneliti menggunakan teori stakeholders dalam pariwisata yang meliputi sektor publik, sektor swasta, dan non-pemerintah organisasi (LSM), masyarakat lokal dan pariwisata berkelanjutan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan memainkan peran sebagai pemangku kepentingan dengan benar untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Kesimpulannya, masing-masing pemangku kepentingan harus menjalankan perannya dan mendukung kebijakan yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Penelitian mengenai stakeholders pariwisata berkelanjutan dengan judul *Stakeholders in a Tourist Destination – Matrix of Possible Relationships Towards Sustainability* ini yang disusun oleh Iva Slivar selaras dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori dari Teori yang digunakan menurut Cooper, Fletcher, Gilbert et al. (2005) bahwa stakeholders dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu penduduk setempat, wisatawan, industri pariwisata, sektor publik dan lainnya sebagai pemangku kepentingan utama dalam pariwisata. Penelitian ini mengembangkan matriks dengan meminta para pakar pariwisata untuk menunjukkan kunci interaksi antara dua pemain. Fokus dari makalah ini akan berada di kolaborasi pemangku kepentingan tujuan dua arah, disajikan secara sistematis dalam matriks hubungan tipikal, mewakili kontribusi teoretisnya. Panel ahli dari akademisi, praktik dan sektor publik mengembangkan matriks hubungan dengan ruang lingkup menyebarkan berbagai bentuk kolaborasi antara para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan keseimbangan yang tepat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang disusun oleh W. Phanumat et al dengan judul *A multi-stakeholder participatory approach in community-based tourism development: a case study from Thailand*. Teknik yang digunakan untuk evaluasi adalah pertemuan formal, wawancara informal, dan partisipatif penilaian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: rasional untuk pendekatan partisipatif multi-pihak dalam pengembangan pariwisata, pariwisata

berbasis masyarakat: pendekatan partisipatif di pengembangan pariwisata, dan hambatan partisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Danchao Hu pada tahun 2011 dengan judul *Using actor-network theory to understand inter-organizational network aspects for strategic information systems planning* menggunakan teori *Actor-network theory* (ANT) dalam pembahasannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dimulai dengan tinjauan literatur dan penelitian formulasi pertanyaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ANT menyediakan cara yang tepat untuk memahami jaringan sebagai aktor-jaringan heterogen, dan evolusi jaringan sebagai proses penerjemahan, yang termasuk empat elemen: problematisasi, interesement pendaftaran, dan mobilisasi.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu, yaitu penulis secara spesifik membahas berbagai aktor, peran aktor, tahapan jaringan aktor serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Teori yang digunakan sebagai indikator penentuan pemetaan aktor serta indikator faktor pendukung dan penghambat juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan lainnya adalah lokus yang menjadi tempat penelitian, yaitu di Desa Wisata Kandri. Namun, penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian yang menjadi acuan bagi penelitian penulis.

Berikut rangkuman penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	<p>Fitri Handayani, Hardi Warsono</p> <p>Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang</p> <p>Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.</p> <p>Peneliti menggunakan teori Maryono et al. (Yosevita, 2015: 25), dimana stakeholder dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stakeholder primer Stakeholder kunci Stakeholder pendukung (sekunder) <p>Teori yang digunakan dalam menganalisis stakeholders adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Reed et al., 2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) dalam penelitian (Kadir Wakka : 10) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Subyek (<i>Subjects</i>) Pemain Kunci (<i>Key Players</i>) Pengikut Lain (<i>Crowd</i>). Pendukung (<i>Contest setters</i>). <p>Teori yang selanjutnya digunakan dalam peran stakeholders menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat setempat, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan termasuk pencipta kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata lebih menekankan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik. Upaya sedang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat, yaitu melakukan kerja sama antara pengelola Pantai Karang Jahe dengan pemilik tanah, membangun kesadaran pariwisata melalui kelompok kesadaran pariwisata, dan memberdayakan penduduk desa untuk memanfaatkan limbah menjadi produk komersial, sanksi diatur di desa dalam hal pembentukan bisnis pariwisata, perbaikan situs web Dinbudparpora terkait dengan kegiatan promosi objek wisata Pantai Karang Jahe, serta perlunya melakukan kerja sama yang mengikat antara pemangku kepentingan dukungan melalui nota kesepakatan kerja sama.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator aktor, peran aktor, serta faktor yang mempengaruhi menjadi acuan bagi penelitian penulis.</p>

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		stakeholder diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain: a. <i>Policy creator</i> b. Koordinator c. Fasilitator. d. Implementer e. Akselerator		
2.	Yosevita Th. Latupapua Implementasi Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Manusela (Tnm) Di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 19077556	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti dalam mengidentifikasi stakeholders menggunakan teori Maryono et al (2005) dimana stakeholder dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: a. Stakeholder primer b. Stakeholder kunci c. Stakeholder pendukung (sekunder)	Berdasarkan pada hasil observasi di lokasi amatan, partisipasi masyarakat di kedua desa cukup baik, mereka terlibat sebagai pelaku wisata dalam menyiapkan berbagai keperluan, juga memberikan berbagai informasi terkait dengan data flora fauna endemik bagi Balai TNM sebagai kebutuhan data base dalam kegiatan pengelolaan ekosistem flora fauna hutan dalam kawasan, di samping itu masyarakat selalu berusaha menjaga situasi dan kondisi desanya dalam keadaan kondusif, sehingga wisatawan akan mendapatkan kenyamanan selama berwisata. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam menunjang aktifitas wisatawan dilakukan melalui menyediakan penginapan dengan standar dan desain lokal, penyedia sarana angkutan laut dan darat yaitu perahu, dan kole-kole, ojek, jasa porter, jasa guide lokal, dan pemilik warung. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan mereka baru sebatas pelaku usaha, keterlibatan dengan perencanaan kegiatan dalam memberikan ide atau saran belum dilibatkan.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator aktor, peran aktor, serta faktor yang mempengaruhi menjadi acuan bagi penelitian penulis.

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			<p>Sedangkan lemahnya peran dengan prinsip ekowisata dengan mengutamakan kelestarian aspek ekologis sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Pemkab (provinsi dan kabupaten) terkait pengembangan ekowisata di TNM disebabkan karena peraturan dan kebijakan yang kurang kondusif. Dengan lahirnya aturan main yang menyangkut hak pengelolaan taman nasional dibawah pengawasan dan tanggungjawab pada tingkat pusat, dalam hal ini kementerian kehutanan melalui Dirjen PHKA, secara tidak langsung membatasi hak pengelolaan kepada pemerintah daerah. Disamping itu Pemkab sendiri merasa adanya keterbatasan dana dan sumberdaya dalam mengelola taman nasional, keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pengembangan masih dalam batas negosiasi, terkait dengan pengembangan sarana penginapan pada area hutan mangrove, namun hal tersebut juga belum terealisasi di lapangan. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan peran stakeholder adalah pihak pemerintah pusat harus dapat mengeluarkan perda dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan taman nasional, perlu adanya koordinasi yang dilakukan oleh balai TNM selaku pengelola kawasan dalam menjaring hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan LSM terkait mulai dari perencanaan program pengembangan hingga monitoring pelaksanaan kegiatan ekowisata.</p>	

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			di samping itu perlu dilakukan peningkatan pemahaman konsep ekowisata pada seluruh stakeholder melalui pelatihan ataupun magang yang berhubungan dengan pengembangan konsep ekowisata, agar dalam pengembangan produk daya tarik yang dikembangkan selalu dilakukan sesuai	
3.	Aji Winara dan Abdullah Syarief Mukhtar Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Papua Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol 8, No 3 (2011)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti dalam menganalisis potensi pengembangan manajemen kolaborasi dilakukan melalui bantuan analisis kekuatan pemangku kepentingan (stakeholder) menurut Meyers (2001) dan Permenhut nomor P.19/ Menhut-II/2004 yang dilakukan melalui tahapan : 1. Pembobotan pada setiap lembaga pemangku kepentingan 2. Pengelompokan setiap lembaga yang berada pada skala bobot nilai penting dilakukan dengan bantuan matrik kuadran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terhadap Taman Nasional (TN) Teluk Cenderawasih adalah (1) kelompok pemerintah, baik pusat maupun daerah, (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, (3) pihak swasta dan (4) masyarakat lokal. Pemangku kepentingan utama terhadap pengelolaan taman nasional adalah Balai TN Teluk Cenderawasih, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat adat. Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan terhadap taman nasional yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Terdapat peran positif para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan taman nasional namun belum membentuk sinergi, sehingga sistem kolaborasi potensial untuk diterapkan dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan penelitian penulis namun dengan lokus yang berbeda. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fenomena penelitian dengan indikator aktor dan peran aktor yang menjadi acuan bagi penelitian penulis.
4.	Muhammad Tofan, Ari Subowo, Maesaroh	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan	Penelitian strategi ini berdasarkan analisis lakmus ada enam isu strategis: Membangun fasilitas dan infrastruktur, peningkatan kuantitas dan kualitas	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dan lokus yang sama dengan penelitian

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
	Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Journal Of Public Policy And Management Review Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014	teori Analisis SWOT. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan peluang (<i>opportunities</i>), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (<i>weakness</i>) dan ancaman (<i>threats</i>).	sumber daya manusia, pengembangan objek wisata berkualitas, peningkatan strategi promosi, peningkatan koordinasi antara masyarakat lokal dengan dinas pariwisata dan pihak terkait.	penulis sehingga terdapat beberapa indikasi masalah yang menjadi acuan penyusunan penelitian penulis.
5.	Tri Yuniningsih, Titi Darmi, Susi Sulandari Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (84 – 93)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teori Aktor Kebijakan menurut Howlett dan Rames (1995) (dalam Suwatri, 2011): 1. <i>elected officials</i> 2. <i>appointed officials</i> atau pejabat politik yang ditunjuk 3. <i>interest group</i> , 4. <i>research organization</i> 5. media massa. Teori kedua yang digunakan yaitu teori Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (lima unsur), yaitu: <i>Academician</i> , <i>Business</i> , <i>Community</i> , <i>Government</i> dan <i>Media</i> .	Dari penelitian dapat diketahui : (1) Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model pentahelix, sudah melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa (2) Temuan lapangan adalah Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal dan (3) Kerjasama antar aktor model pentahelix yang ada di kota Semarang dari hasil penelitian belum optimal. Rekomendasi penelitian: dilakukan revisi terhadap perda kepariwisataan kota Semarang yang menyangkut “kerjasama antar aktor, penguatan kapasitas kelembagaan BP2KS, dan peneliti berikutnya disarankan mengambil fokus penelitian dengan lokus yang berbeda atau melakukan perbandingan dengan fokus yang sama.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dan lokus yang berbeda namun menjadi acuan dalam menentukan fenomena penelitian berupa aktor kebijakan dan model kolaborasi antar aktor bagi penelitian penulis.

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
6.	Zaleha Mohamad et al A role of multiple stakeholder towards sustainable tourism in Setiu wetlands Opción, Año 35, Especial No.21 (2019): 1172-1187 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385	Pendekatan penelitian ini adalah metode kuantitatif yang melibatkan 120 responden. Peneliti menggunakan teori stakeholders dalam pariwisata yang meliputi sektor publik, sektor swasta, dan non-pemerintah organisasi (LSM), masyarakat lokal dan pariwisata berkelanjutan.	Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan memainkan peran sebagai pemangku kepentingan dengan benar untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Kesimpulannya, masing-masing pemangku kepentingan harus menjalankan perannya dan mendukung kebijakan yang telah direncanakan oleh Pemerintah.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dan lokus yang berbeda namun menjadi acuan dalam menentukan fenomena penelitian berupa aktor dan peran aktor bagi penelitian penulis.
7.	Iva Slivar Stakeholders in a Tourist Destination – Matrix of Possible Relationships Towards Sustainability Open Journal for Research in Economics, 2018, 1(1), 1-10. ISSN (Online) 2620-102X	Untuk mengembangkan matriks yang diumumkan, penulis telah meminta para pakar pariwisata untuk menunjukkan kunci interaksi antara dua pemain. Teori yang digunakan menurut Cooper, Fletcher, Gilbert et al. (2005) bahwa stakeholders dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu penduduk setempat, wisatawan, industri pariwisata, sektor publik dan lainnya sebagai pemangku kepentingan utama dalam pariwisata.	Fokus dari makalah ini akan berada di kolaborasi pemangku kepentingan tujuan dua arah, disajikan secara sistematis dalam matriks hubungan tipikal, mewakili kontribusi teoretisnya. Panel ahli dari akademisi, praktik dan sektor publik mengembangkan matriks hubungan dengan ruang lingkup menyebarkan berbagai bentuk kolaborasi antara para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan keseimbangan yang tepat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini memberikan gambaran terhadap kolaborasi stakeholders dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.
8.	W. Phanumat et al	Teknik yang digunakan untuk 1.	Makalah ini menyajikan model partisipasi multi-pemangku kepentingan di Indonesia pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Thailand	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis.

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
	<p>A multi-stakeholder participatory approach in community-based tourism development: a case study from Thailand</p> <p>WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 193, www.witpress.com, ISSN 1743-3541 (on-line) © 2015 WIT Press</p>	<p>evaluasi adalah pertemuan formal, wawancara informal, dan partisipatif penilaian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rasional untuk pendekatan partisipatif multi-pihak dalam pengembangan pariwisata 3. Pariwisata berbasis masyarakat: pendekatan partisipatif di pengembangan pariwisata 4. Hambatan partisipasi dalam pengembangan pariwisata <p>DASTA: administrasi pariwisata berkelanjutan di Thailand</p>	<p>berkonsentrasi pada peran DASTA dalam mengurangi hambatan untuk menerapkan partisipasi aktif untuk manfaat dari komunitas tuan rumah. Hasilnya bisa menjadi studi kasus untuk pariwisata administrasi untuk diterapkan terutama di negara berkembang di mana pendekatan partisipatif tidak diterapkan secara luas atau aktif.</p>	<p>Dalam penelitian ini memberikan gambaran terhadap kolaborasi stakeholders dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.</p>
9.	<p>Danchao Hu (2011)</p> <p>Using actor-network theory to understand inter-organizational network aspects for strategic information systems planning</p> <p>Hu, Danchao. 2011. Master thesis: "Using actor-network theory to understand inter-</p>	<p>Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penugasan master ini dimulai dengan tinjauan literatur dan penelitian formulasi pertanyaan. Peneliti menggunakan teori <i>Actor-network theory</i> (ANT).</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa ANT menyediakan cara yang tepat untuk memahami jaringan sebagai aktor-jaringan heterogen, dan evolusi jaringan sebagai proses penerjemahan, yang termasuk empat elemen: problematisasi menunjukkan aktor yang paling penting, apakah manusia atau non-manusia, dan mendefinisikan masalah sehingga aktor lain mengenali mereka sebagai milik mereka masalah; intersement mengunci para aktor agar selaras dengan pendekatan yang kami sebut 3 "Alat senggang"; pendaftaran adalah hasil dari proses sebelumnya, dimana lebih dari itu sekutu dilampirkan yang perannya harus didefinisikan dan</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini memberikan gambaran terhadap penggunaan teori jaringan aktor yang dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis.</p>

No	Nama Penulis, Judul dan Nama Jurnal	Metode dan Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
	<i>organizational network aspects for strategic information systems planning</i> ". School of Management and Governance (SMG), Business information technology, University of Twente Enschede, The Netherlands		dikoordinasikan; dan mobilisasi mempertahankan jaringan dengan memverifikasi keterwakilan alien dengan membujuk mereka bahwa kepentingan mereka sama dengan penerjemah.	

Sumber: data diolah dari beberapa kebaruan penelitian yang berbeda-beda, 2020

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Pifner dan Presthus dalam Syafiie (2013:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Nigro bersaudara dalam Syafiie (2010:24), pengertian Administrasi Publik sebagai berikut:

1. Administrasi Publik adalah suatu kerjasam kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan bagian dari proses politik.
4. Administrasi publik sangat erat kaitanya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) mendefinisikan administrasi publik merupakan suatu proses atau kegiatan dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk

mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian mengenai administrasi publik di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak lain untuk mengatur dan menjalankan negara serta untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Berbicara mengenai administrasi publik maka tidak terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi selama ini. Pergeseran tersebut dikarenakan paradigma sebelumnya mengalami berbagai masalah dan dipandang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini bahkan membuat orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada yang kemudian berusaha membangun paradigma baru. Terkait dengan pembahasan paradigma maka Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) mengatakan bahwa paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Lebih ringkasnya paradigma merupakan corak berpikir seseorang atau sekelompok orang.

Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma Administrasi Negara yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada paradigma ini, administrasi harus dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *governement bureaucracy*. Paradigma ini lebih menekankan pada lokus saja yaitu “*governement bureaucracy*” namun kurang menekankan pada fokus.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Dalam paradigma ini yang menjadi fokus adalah prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Gulick dan Urwick yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting Budgeting*. Prinsip-prinsip administrasi tersebut diperkenalkan sebagai fokus administrasi publik yang dapat diterapkan dimana saja atau bersifat universal sementara lokus dari administrasi publik dinilai kurang jelas sebab prinsip tersebut dapat diterapkan baik pada organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

3. Paradigma 3 Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx seorang editor buku “*Elements of Public Administration*” di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap

ketidakkonsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam 12 konteks ini, administrasi negara bukannya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value free administration* disatu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* lain pihak.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus pada paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern yang diasumsikan dapat diterapkan baik pada dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 - ?)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokus nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

Ikeanyibe dkk (2017) menambahkan paradigma Administrasi Negara yang ke-6 (enam) yang diuraikan seperti berikut ini:

6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Selain itu, Stoker (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) melanjutkan bahwa terdapat lima proposisi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi prinsip paradigma ini yaitu :

1. Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah
2. Batas yang abu-abu dan tanggungjawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi
3. Ketergantungan kekuasaan diantara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
4. Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri
5. Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk memerintahkan atau mengguakan wewenangnya.

Gibson (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) mengamati bahwa terdapat banyak bentuk dari paradigma *governance* (tata kelola) yang didokumentasikan dalam literatur. Setiap model *governance* (tata kelola)

mengusulkan penekanan yang berbeda yang kurang atau lebih bergantung pada konteks lokal. Beberapa model ini terdiri dari sebagai berikut:

1. *Governance as Government* (Pemerintahan sebagai pemerintah)

Pada konteks ini berkaitan dengan penjelasan keberadaan dari masyarakat, pihak ketiga, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan telah ada mulai dari administrasi publik pada era tradisional. Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap menjadi pemegang inisiatif dalam hal mengintegrasikan aktor-aktor lainnya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

2. *Good Governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik)

Model ini menekankan pada pentingnya peranan dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

3. *Governance as Good Enough Governance* (Pemerintahan sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik)

Model ini merupakan konsep dan model alternatif yang diperkenalkan oleh Merilee Grindle dalam tulisannya mengenai penekanan dalam *good governance*. Tata kelola yang cukup baik berkaitan dengan kontribusi intervensi dalam perkembangan politik dan ekonomi perlu dipertanyakan, diprioritaskan, dan relevan dengan kondisi negara tersebut. Pemerintah sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik tidak membahas mengenai jalan pintas mengenai pembangunan, pengembangan kebijakan, implementasi program, pemberian layanan

ataupun isu-isu dalam *good governance*. Konsep ini hanya mengadvokasi penggunaan pendekatan inkremental dan kontinjensi dalam prioritas dalam mengejar tata pemerintahan yang baik mengingat kenyataan keterbatasan sumber daya uang, waktu, pengetahuan, dan kapasitas manusia dan organisasi.

4. *Collabortive, Partnership, Network Governance* (Kolaborasi, kemitraan, dan jaringan pemerintahan)

Model baru dari pemerintahan ini menekankan pada fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, serta banyak hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal daripada proses internal, organisasi, uang, waktu, pengetahuan, kapasitas manusia, dan organisasi.

Lina Marliani (2018:4-6) menjabarkan tiga paradigma lainnya dalam administrasi negara/publik, yaitu sebagai berikut :

1. *Old Public Administration* (OPA) disebut juga administrasi negara klasik, dimana OPA menyatakan bahwa bidang administrasi harus memiliki struktur hierarki agar tujuan lebih efisien dan tujuan pemerintah adalah melaksanakan kebijakan dan memberi pelayanan yang dilaksanakan secara netral, profesional dan lurus. Dalam OPA timbul rasional model dari Herbert Simon dalam Thoha (2014:73), dengan ide-ide OPA sebagai berikut:

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah jasa pelayanan yang langsung oleh instansi pemerintah;

- 2) *Public policy* dan administrasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan;
 - 3) Administrasi publik memiliki peran yang kecil dalam proses pembuatan kebijakan;
 - 4) Pelayanan oleh administrator bertanggung jawab pada pejabat politik yang diberi diskresi terbatas;
 - 5) Administrator bertanggung jawab pada pimpinan politik yang dipilih secara demokratis;
 - 6) Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki dan kontrol oleh pejabat dari hierarki atas organisasi,
 - 7) Nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas;
 - 8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan tertutup;
 - 9) Administrasi publik dirumuskan secara luas, seperti dalam POSDCoRB.
2. *New Public Manajemen* (NPM) menjadi begitu populer ketika prinsip-prinsip *Good Governance* diimplementasikan. Dalam konsep *New Public Manajemen* (NPM) semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak menyapu bersih semua pekerjaan, tetapi membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan hal-hal yang bersifat strategis saja. Dengan demikian kunci NPM adalah

menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Orientasi *New Public Manajemen* (NPM) menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (Pasolong, 2013:35) adalah :

- 1) Orientasi *the drive* yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja;
 - 2) Orientasi *downsizing and decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas pada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat;
 - 3) Orientasi *in search of excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) Orientasi *public service* yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberi perhatian lebih besar pada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi user dan warga masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi pada pejabat yang dipilih oleh masyarakat, menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik, evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.
3. *New Public Service* (NPS). Inti dari NPS adalah bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Sejalan dengan filosofi demokrasi yang didefinisikan secara sederhana bahwa pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan nilai-nilai atau norma mendasar yang harus

diterapkan oleh pelayan publik dalam melayani kepentingan publik.

Denhardt dalam Pasolong (2013:36) ide pokok *new public service* :

- 1) *Serve citizen, not customers*, yaitu bahwa aparaturnya pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan, tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antara warga Negara (citizen);
- 2) *Seek the public interest*, yaitu administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun kebersamaan, membagi gagasan dari kepentingan publik;
- 3) *Value citizenship over entrepreneurship*, yaitu kepentingan publik lebih didahulukan oleh komitmen aparaturnya pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti dari pada oleh para manajer swasta sebagai bagian dari keuntungan publik yang menjadi milik mereka;
- 4) *Think strategically, act democratically* yaitu pertemuan antara kebijakan dan program agar lebih efektif dan efisien secara bertanggungjawab mengikuti upaya bersama dan proses kebersamaan;
- 5) *Recognized that accountability is not simple* yaitu aparaturnya pelayanan publik harus penuh perhatian lebih baik daripada pasar;
- 6) *Serve rather than steer*, yaitu pelayanan publik harus turut andil dalam membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian mereka lebih dari berusaha mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada petunjuk baru;

7) *Value people, not just productivity*, yaitu organisasi publik dan kerangka kerjanya lebih sukses dalam kegiatannya kalau mereka mengoperasikan sesuai proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang.

Dalam kaitannya dengan paradigma Administrasi Publik, penelitian ini mengacu pada paradigma ke-6 (enam) yaitu *Governance* sebab penelitian ini menyoroti mengenai jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Pada paradigma ini menekankan pada salah satu prinsip yaitu jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah sehingga fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, serta banyak hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal.

Konsentrasi dalam ilmu Administrasi Publik dibedakan menjadi dua, yaitu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik. Kebijakan Publik berkenaan dengan proses formulasi, implementasi hingga evaluasi. Sedangkan Manajemen Publik berkaitan dengan proses perencanaan, kinerja, dan sebagainya.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut W.I. Jenkins dalam Wahab (2012:15), merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang telah diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor dimana keputusan tersebut saling berkaitan, berkenaan dengan tujuan yang sudah dipilih beserta berbagai upaya untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Keputusan yang diambil masih dalam batas wewenang kekuasaan dari para aktor tersebut. Sedangkan Federich (Indiahono, 2009:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Anderson dalam Winarno (2012:21) menawarkan definisi lain kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik menyangkut apa yang dilakukan, siapa yang melakukan serta memiliki tujuan tertentu.

Menurut William N. Dunn sebagaimana dikutip dalam Winarno (2012:35-37) mengungkapkan bahwasanya tahapan kebijakan publik terdiri dari 5 tahap, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dibuat telah mampu menyelesaikan masalah.

Gambar 1.1
Tahap-Tahap Kebijakan Publik



Sumber: Winarno, 2012: 37

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Definisi implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2012:65) adalah sebagai berikut:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Kemudian Solichin Abdul Wahab (2012) mempunyai pendapat lain bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya bukan hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program yang dapat menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan yang mana untuk menjalankannya melibatkan berbagai macam aktor kebijakan, terdapat tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sehingga kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mempunyai dampak serta *output* dan *outcomes* yang diharapkan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa aktor implementasi kebijakan memegang peranan yang vital dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan atau kegagalan suatu proses implementasi kebijakan tentu salah satunya dipengaruhi oleh faktor penting, yang tidak lain adalah aktor kebijakan itu sendiri. Aktor kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Tanpa adanya aktor kebijakan yang kredibel serta tepat pada fungsinya, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya dan tujuan kebijakan tidak akan dirasakan oleh kelompok sasaran yang dituju.

1.6.6 Identifikasi Aktor

Howlett dan Ramesh (dalam Suwitri, 2011) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan aktor adalah mereka yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik organisasi publik maupun privat. Aktor sering juga disebut dengan istilah *stakeholders*. Gonslaves (Iqbal, 2007:90) menjelaskan *stakeholders* sebagai siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Setiap kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Freeman (1984:37) keberadaan aktor menjadi penting karena *stakeholders* atau aktor yang memiliki peran merupakan pihak yang dapat memberikan pengaruh dan/atau dipengaruhi dalam usaha pencapaian tujuan sebuah program. Lebih daripada itu, analisis aktor juga diperlukan untuk mengetahui posisi dan peran masing-masing aktor. Selanjutnya, menurut

Reed et al (2009:1-17) terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam analisis aktor atau *stakeholders*. Pertama, melakukan identifikasi aktor. Kedua, mengelompokkan aktor ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Ketiga, menelaah hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya. Keberadaan analisis aktor atau *stakeholders analysis* akan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang jaringan aktor yang terbentuk.

Howlett dan Ramesh (dalam Yuniningsih, 2018) menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selaku dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan pro aktif di dalam melakukan interaksi dan interalasi di dalam kontekks analisis kebijakan publik.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:37) yang dimaksud dengan aktor-aktor kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat terpilih (*elected official*). Pejabat yang terpilih berpartisipasi dalam proses kebijakan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu anggota legislatif dan eksekutif.
- 2) Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*), merupakan asisten birokrat, biasanya sebagai kunci dasar dan figur sentral dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan.
- 3) Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*). Pemerintah seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-

kelompok kepentingan guna efektifitas kebijakan atau untuk menyerang oposisi mereka.

- 4) Organisasi-organisasi penelitian (*research organization*), yaitu berupa universitas, kelompok ahli atau konsultan kebijakan.
- 5) Media massa (*mass media*) yaitu sebagai jaringan hubungan yang krusial antara negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan peran reporter dengan peran analisi aktif sebagai advokasi solusi.

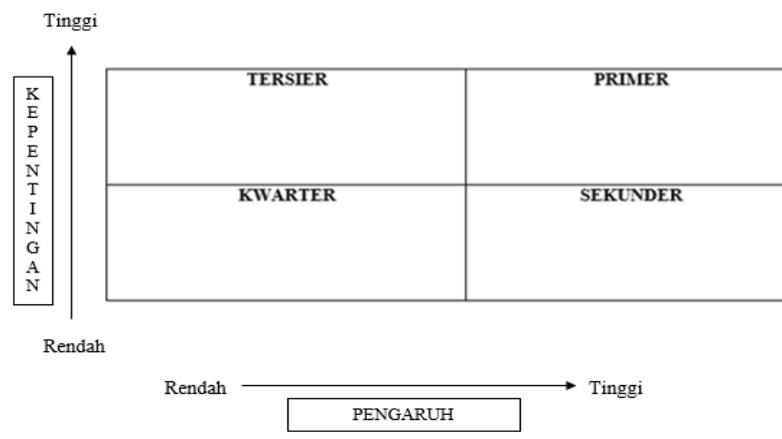
Identifikasi aktor adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan aktor-aktor kunci yang mengambil bagian dari pelaksanaan suatu kegiatan/proyek. Kaufman (dalam Suwitri, 2011) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu program, akan bijaksana jika pelaksanaan program mengidentifikasi aktor kunci, kepentingan mereka, apa yang akan mereka dukung serta strategi untuk dapat bekerjasama dengan mereka, hal ini ditujukan untuk mengatur sesuatu hal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Identifikasi aktor dilakukan untuk melihat bagaimana keterlibatan atau peran aktor dalam setiap tahap pelaksanaan suatu program. Menurut pendapat Viney dalam Yuniningsih (2018), pendekatan terhadap aktor disesuaikan dengan kondisi aktor itu sendiri, yaitu:

- a) Aktor Primer atau Rekan Kerja (*Partner*): Aktor primer (dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan kegiatan) adalah pihak yang mendukung dalam perencanaan dan implementasi

dari keseluruhan kegiatan. Aktor ini harus didampingi untuk meningkatkan kesepakatan dan komitmen mereka terhadap kegiatan;

- b) Aktor Sekunder atau Konsultasi (*Consult*): Aktor yang memperoleh opini dan input mereka sehingga dapat diperoleh keputusan kunci dimana mereka akan terpengaruh secara langsung. Hasil konsultasi menjadi strategi untuk meningkatkan komitmen mereka;
- c) Aktor Tersier atau Informasi (*Inform*): Aktor sekunder dengan pengaruh yang lebih rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi membutuhkan informasi tentang keputusan yang ditetapkan dan mungkin berdampak langsung terhadap mereka, agar mereka tetap terlibat dalam acara-acara penting yang berkaitan dengan keputusan walaupun tidak berperan aktif dalam pembuatan keputusan;
- d) Aktor Kwartir atau Kontrol (*Control*): Kontrol diperlukan bagi aktor yang tidak mempunyai kepentingan atau pengaruh dan mereka memberikan bantuan hanya untuk menghormati keputusan yang ditetapkan.

Gambar 1.2
Kuadran Identikasi Aktor



Sumber: diolah penulis, 2020

1.6.7 Peran Aktor

Untuk mengetahui peran dari masing-masing aktor dalam implementasi kebijakan maka Nugroho (2014:16-17) mengklasifikasikan aktor berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator* yaitu aktor yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu aktor yang berperan mengkoordinasikan aktor lain yang terlibat dalam kebijakan.
3. Fasilitator yaitu aktor berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
4. Implementor yaitu aktor pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator yaitu aktor yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

1.6.8 Jaringan Aktor / *Actor Network Theory* (ANT)

Dalam Yuniningsih (2018) teori jaringan aktor atau *Actor Network Theory* (ANT) adalah sebuah pendekatan yang berasal dari bidang studi ilmu pengetahuan, yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Konsep jejaring - aktor pertama digagas oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law di tahun 1980-an. Menggunakan metafora jejaring aktor, asumsi ontologi yang dipakai oleh teori jejaring aktor adalah bahwa realitas (sosial, organisasi, teknologi, dll) semuanya hanyalah hasil atau akibat dari suatu relasi antara berbagai jenis entitas baik yang berupa

bendawi maupun manusiawi. Semua entitas yang terlibat di dalam jejaring ini selanjutnya disebut dengan “aktor”.

Menurut Yuniningsih (2018) terdapat beberapa kata kunci dalam teori *Actor Network Theory* (ANT) seperti konsep mengenai jaringan, aktor, translasi, dan intermediary. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Aktor

Aktor adalah pelaku, yang menjadi pertanyaan berapa banyak pelaku dalam melaksanakan sebuah aksi. Sebagai contoh dari *Actor Network Theory* (ANT) ini, misalnya Newton sebagai salah satu aktor tidak benar-benar bertindak sendiri dalam menciptakan teori gravitasi, sebab ia membutuhkan aktor lain (data pengamatan dari beberapa temannya).

b. Jaringan Aktor/pelaku.

Jaringan (*network*) adalah jejala, atau yang terangkai atau terhubung. Misalnya, ketika mengendarai mobil, kita dipengaruhi (diproses) oleh peraturan lalu lintas, diproses pengalaman menyetir dan kemampuan manuver mobil. Kata prosesor = pelaku yang memproses berdasar pengalaman sebelumnya. Semua faktor ini terhubung (terjaring) yang menyebabkan bagaimana kita bertindak. Kita tidak akan melakukan bisnis dalam keadaan kosong (tanpa petunjuk) tetapi di bawah pengaruh berbagai faktor, semua faktor-faktor yang mempengaruhi harus dipertimbangkan bersama-sama, yang disebut dengan “Jaringan aktor”.

Atau sebaliknya semua tindakan yang terhubung bersama-sama, segala faktor-faktor yang mempengaruhi, terhubung, akan menghasilkan jaringan. Jaringan aktor terdiri dari jaringan bersama-sama baik elemen

teknis dan non-teknis. *Actor Network Theory* (ANT) berbicara tentang sifat heterogenitas jaringan aktor.

c. Aktan (Aktor Pengendali)

Dalam teori *Actor Network Theory* (ANT) telah mengembangkan suatu kosa kata yang tidak mengambil perbedaan antara subyek dan obyek ke dalam pertimbangan sebagai aktor. Aktor adalah semua elemen yang terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara alamiah. Aktor yang mampu mengontrol aktor lain disebut sebagai aktan. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu jaringan berdasarkan kemauan dan kepentingannya. Saat aktan memasuki suatu jaringan, maka jaringan tersebut akan memberi nama atau julukan, aktifitas, perhatian, serta peranan dalam jaringan tersebut. Dengan kata lain, aktan inilah elemen utama dan menjadi penggerak dalam jaringan. Sebagai ilustrasi, kita dapat mengambil contoh sistem akademik, yang disebut aktor adalah mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya dan yang disebut sebagai aktan adalah mahasiswa dan dosen yang dapat mengendalikan aktor lain seperti mahasiswa mampu mengendalikan mata kuliah yang akan diambil atau dosen yang mampu mengendalikan IP mahasiswanya. Setiap aktan akan memiliki nama atau julukan seperti “dosen pemrograman” dan aktifitas “mengajar”.

d. Translasi

Teknik translasi adalah bagian dari semiotika bahasa yang dipakai untuk menterjemahkan/transfer kode tanda, dari berbagai bahasa dan budaya untuk menentukan aktor dalam jaringan.

e. *Intermediary*

Intermediary merupakan sebuah layer, perantara, seorang perunding yang bertindak sebagai penghubung antara pihak aktor atau sekumpulan aktor, seseorang yang, atau hal yang akan menengahi; antar inter-agent, atau perantara.

Menurut Latour dalam Yuniningsih (2018) bahwa teori ANT biasanya tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana jaringan terbentuk. Sebaliknya adalah benar-benar cara untuk mengeksplorasi hubungan relasional dalam jaringan yang bisa menjadi banyak hal yang berbeda. Sedangkan menurut Riyanto dalam Yuniningsih (2018) ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam teori jaringan aktor:

1. Tahap pertama, *Punctualization* adalah proses memperlakukan jaringan heterogen sebagai sebuah aktor individu untuk mengurangi kompleksitas jaringan (Law, 2003). Langkah ini sangat penting dalam melakukan penelitian sebagai simplikasi penarikan kesimpulan. Kompleksitas jaringan dimana satu aktor utama mempunyai banyak aktor dibelakangnya sebagai akibat penyelarasan kepentingan dan sepakat untuk bergabung menjadi demikian kompleks apalagi jaringan tersebut tidak hanya terdiri dari materiil namun juga non materiil, sehingga langkah ini merupakan simplikasi dengan memperlakukan jaringan heterogen sebagai sebuah aktor individu.
2. Tahap kedua, *Translation* merupakan proses penyelarasan keinginan pada bermacam – macam aktor dan keinginan aktor utama. Penciptaan sebuah jaringan aktor. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama:

permasalahan, kepentingan, dan peran. Kebanyakan aktor dalam organisasi terlibat dalam proses translation yang berbeda, setiap aktor memiliki ciri dan *outcome* unik. Untuk memperjelas, penggunaan focus pada satu aktor sangat berguna, dari mana titik yang menguntungkan disitulah proses translasi dilihat.

3. Tahap ketiga, *Problematization*. Setelah proses translasi, aktor mendefinisikan kepentingan aktor lainnya yang konsisten dengan kepentingannya sendiri. Di tahap ini satu atau lebih aktor kunci merumuskan masalahnya serta mendefinisikan peran aktor lain dalam penyelesaian masalah yang ia usulkan. Penyelesaian diusulkan sedemikian hingga semua aktor yang terlibat terikat kepada suatu mekanisme kendali terpusat yang disebut dengan “*obligatory passage point*” (OPP). Penggabungan kekuatan yang disepakati dengan penyamaan permasalahan dengan perbedaan kepentingan menghasilkan pembagian peran dalam pencapaiannya. Untuk mencapai kesepakatan selanjutnya dibutuhkan momen kedua translasi yaitu *Interessment*.
4. Tahap keempat, *Interessment*, momen kedua translasi yang melibatkan proses meyakinkan aktor-aktor lain untuk menerima definisi dari aktor lokal. Momen kedua adalah langkah lanjutan dari momen pertama translasi dimana pada momen ini aktor utama berusaha meyakinkan aktor lainnya untuk menerima definisi, cara, bagaimana, dan kapan mencapai tujuan bersama tersebut. Siapa mendapat apa, siapa mengerjakan apa dengan berbagai kesepakatan dan janji yang ditawarkan untuk meyakinkan aktor lainnya.

5. Tahap kelima, *Enrollment*. Momen ketiga translasi, dimana aktor – aktor lain dalam jaringan menerima (atau menyelaraskan dengan) kepentingan yang ditetapkan untuk mereka oleh aktor utama. Dengan berbagai tawaran menarik yang ditukar dengan sumber daya yang dimiliki aktor lain agar menjadi kekuatan bersama, momen ketiga adalah momen disaat aktor lainnya menerima dan menjadi satu jaringan baru yang mempunyai permasalahan yang sama. Pencapaian kepentingan masing-masing aktor peran yang dilakukan masing-masing aktor, bagaimana jaringan dibentuk, siapa mendapat apa dan berbagai tawaran dan janji disepakati pada momen ini.
6. Tahap keenam, *Inscription*. Suatu proses penciptaan artefak yang akan menjamin perlindungan kepentingan tertentu. Kesepakatan yang terbentuk pada momen ketiga dilanjutkan *Inscription*. Proses dimana ada kesepakatan untuk menjamin tercapainya kepentingan masing – masing aktor. Inskripsi ini bisa berupa kertas berisi perjanjian atau hanya berupa kesepakatan lisan. Kesepakatan lisan tanpa saksi merupakan inskripsi yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi sehingga tidak ada proses pengkhianatan setelah cita – cita bersama tercapai, namun pada banyak peristiwa, perjanjian berdasar lisan tanpa saksi banyak menghasilkan perpecahan jaringan.
7. Tahap ketujuh, *Speaker / Delegate representative* aktor yang berbicara atas nama (atau berdiri untuk) aktor-aktor lain. Aktor yang berbicara atas nama aktor lain bisa merupakan aktor utama atau peran yang diberikan oleh aktor utama tersebut kepada aktor lainnya sebagai juru

bicara khusus, siapa yang menjadi juru bicara dan pada tingkatan apa yang disampaikan merupakan keputusan jaringan, kapan aktor utama yang harus berbicara kapan aktor lain yang menjadi juru bicara.

8. Tahapan kedelepan, *Betrayal*. Sebuah situasi dimana aktor tidak mematuhi perjanjian yang timbul dari partisipasi wakil-wakil. Situasi ini karena tidak dilaksanakannya kesepakatan awal dan keluar dari inskripsi yang dibuat sebagai imbalan atas penyerahan sumberdaya kepada aktor utama. Ada inskripsi dalam bentuk tertulis ataupun tidak semuanya mempunyai resiko pengkhianatan yang dilakukan oleh aktor utama.
9. Tahap kesimbalan, *Irreversibility*. Tingkatan selanjutnya yang memungkinkan untuk kembali ke titik dimana kemungkinan alternatif masih ada. Menurut Walsham dan Sahay (1999,42), penyesuaian bisa kembali terjadi setelah adanya *irreversibility* yaitu dimana jaringan yang pecah kembali menyatukan kekuatan. Titik kembali ini bisa terjadi bila permasalahan yang membuat aktor keluar dari jaringan ini kembali terulang dan bisa dimulai dari langkah awal translasi dan tetap mempunyai resiko pengkhianatan. *Actor Network Theory* (ANT) melihat bagaimana cara jaringan mengatasi hambatan dan mendapatkan *koherensi* dan konsisten (stabil), bagaimana mengatur (mendekatkan unsur) dan mengkonverensi (menterjemahkan) elemen jaringan. Bagaimana meminta orang lain untuk mengikuti program yang dicanangkan, bagaimana memberikan kualitas dan motivasi pelaku (menetapkan yang sesuai dengan peranannya), bagaimana orang lain menjadi berguna, dan bagaimana menjadi berfungsi.

Untuk lebih jelasnya tahapan jaringan aktor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Tahapan Jaringan Aktor

No	Tahapan Jaringan	Penjelasan
1.	<i>Punctualization</i>	Identifikasi awal jaringan
2.	<i>Translation</i>	Proses penyalarsan keinginan bermacam-macam aktor dengan keinginan aktor utama
3.	<i>Problematization</i>	Proses mendefinisikan kepentingan aktor lainnya yang konsisten dengan kepentingan sendiri dan menjadikan dirinya sebagai OPP
4.	<i>Interessment</i>	Momen meyakinkan aktor – aktor lain dalam jaringan untuk menerima definisi dari aktor utama
5.	<i>Enrollment</i>	Aktor – aktor lain dalam jaringan menerima kepenntingan yang ditetapkan untuk mereka oleh aktor utama
6.	<i>Inscription</i>	Proses penciptaan artefak untuk menjamin perlindungan kepentingan tertentu
7.	<i>Speaker / Delegate Respresentatif</i>	Aktor berbicara atas nama atau berbicara untuk orang lain
8.	<i>Betrayal</i>	Situasi dimana aktor tidak mematuhi perjanjian yang timbul dari partisipasi wakil – wakil mereka
9.	<i>Irreversibility</i>	Tingkatan selanjutnya yang memungkinkan untuk kembali ke tingkat dimana kemungkinan alternative masih ada. Penyalarsan bisa kembali terjadi setelah adanya <i>irreversibility</i>

Sumber: diadopsi dari Callon dan Latour (2005, Riyanto (2012:65-69), Simanjuntak (2015) (dalam Yuningningsih, 2018))

1.6.9 Jaringan Aktor dalam Implementasi

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya dalam rangka pemecahan masalah yang timbul dalam kehidupan bersama. Tahap-tahap kebijakan publik adalah dimulai dari

proses formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Van Meter dan Horn (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dari definisi di atas dapat dilihat letak aktor dalam sebuah kebijakan bahwa aktor tidak dapat dipisahkan dari implementasi kebijakan.

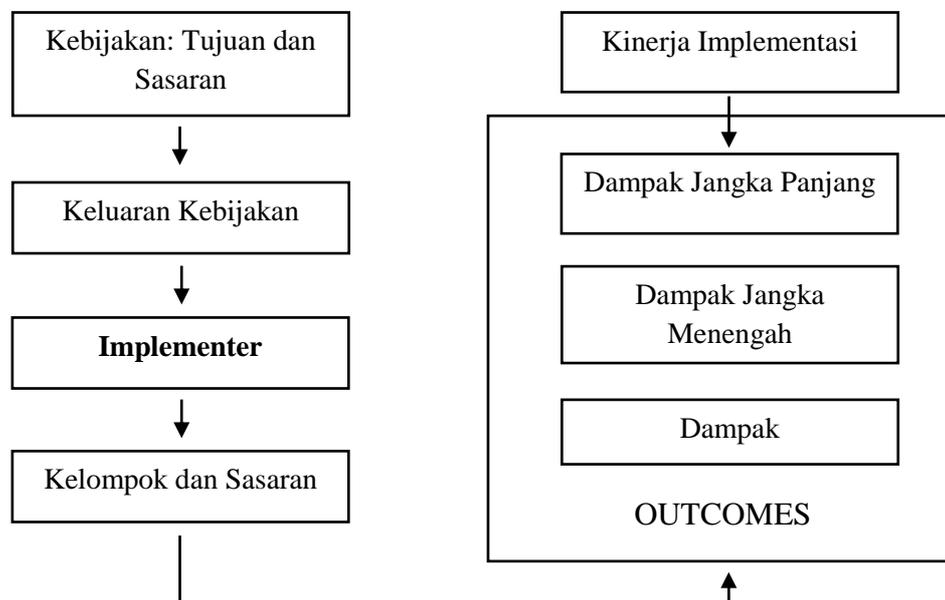
Dalam Simanjuntak (2015:52) *Actor Network Theory* melihat cara bagaimana mengatasi hambatan dan mendapatkan koherensi yang konsisten, bagaimana mendekatkan unsur dan mengkonversi elemen jaringan. Bagaimana meminta orang lain untuk mengikuti program yang dicanangkan, bagaimana memberikan kualitas dan motivasi pelaku

(menetapkan yang sesuai dengan perannya), bagaimana orang lain menjadi berguna, dan bagaimana berfungsi. Jaringan aktor akan membentuk komunikasi, kepercayaan penyerahan sumber daya antar aktor.

Aktor sebagai subsistem kebijakan. Aktor dapat berupa aktor publik, privat, dan aktor dari organisasi internasional. Aktor sebagai salah satu subsistem kebijakan akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Pada tahap implementasi kebijakan terdapat aktor-aktor yang terlibat yang disebut dengan aktor implementasi kebijakan. Besarnya partisipasi dan kelompok mana yang paling berpengaruh adalah berbeda dalam satu kebijakan.

Adapun proses implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Proses Implementasi



Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 72

Dari gambar di atas dapat terlihat peran dan posisi implementer atau aktor implementasi kebijakan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik.

Implementasi kebijakan publik berangkat dari adanya suatu program atau kebijakan yang telah diformulasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Keluaran kebijakan tidak akan sampai kepada kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan yang menghantarkan *policy input* tersebut kepada kelompok sasaran. Kegiatan menghantarkan keluaran kebijakan kepada sasaran ini adalah tugas dari implementasi *agency*. Pada masa lalu, aktor implementasi yang utama adalah birokrasi pemerintah atau eksekutif. Namun seiring dengan perkembangannya, aktor implementasi tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah. Demikianlah aktor-aktor implementasi tersebut muncul dan bersinergi dalam melancarkan implementasi suatu kebijakan agar tersampaikan kepada kelompok sasaran dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Pertimbangan selanjutnya adalah ketika aktor-aktor tersebut berada dalam jaringan. Jaringan akan menyebabkan aktor-aktor yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun, bagaimana jaringan itu terbentuk serta hubungan antar aktor dalam jaringan akan mempengaruhi kinerja jaringan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jaringan yaitu nilai, kepercayaan, komunikasi, dan sumber kebijakan. Jaringan aktor yang terbentuk akan mempengaruhi sebuah kebijakan diimplementasikan. Aktor implementasi kebijakan akan memberikan ritme dalam implementasi kebijakan publik, sebab aktor tersebut akan melakukan interaksi (hubungan relasional) yang disebut jaringan aktor.

1.6.10 Faktor Pendukung dan Penghambat

Menurut pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2012) dalam Yuniningsih (2018) ada beberapa nilai yang mempengaruhi aktor, kepercayaan yang dibangun oleh aktor dalam jaringan, komunikasi yang terbentuk serta bentuk penyerahan sumber daya antar aktor dalam jaringan. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dan memberikan kontribusi baik positif atau negative dalam pembentukan jaringan aktor, yaitu:

- a) Nilai bisa berasal dari individu, organisasi, professional, legal, dan kepentingan umum yang ada dan dibawa oleh masing – masing aktor;
- b) Komunikasi, artinya seberapa intens/sering antar aktor saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama baik lisan maupun tertulis dalam rangka mencapai tujuan/kepentingan bersama;
- c) Kepercayaan, artinya kepercayaan dari masing-masing aktor dalam menjalin hubungan dengan aktor lain untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama;
- d) Sumber kebijakan, artinya kebijakan atau regulasi yang memfasilitasi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk untuk mewujudkan tujuan bersama.

Sedangkan menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1.6.11 Desa Wisata

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001:37), Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Sedangkan menurut Muljadi (2012:12) Desa Wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.

Inti dari produk pariwisata adalah destinasi wisata. Menurut Cooper (1993) untuk membuat sebuah destinasi wisata yang unggul harus mengkaji empat aspek utama (4A) yang harus dimiliki, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas dan *ancillary*.

a) Atraksi, adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di desa wisata tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan

dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan.

- b) Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata. Akses jalan raya dan ketersediaan sarana transportasi yang baik merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi wisata. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi.
- c) Amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum dan fasilitas pendukung lainnya yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah. Tentu saja fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan.
- d) *Ancillary* berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenities

yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka destinasi tersebut akan terbengkalai dan tidak bisa memberikan nilai jual bagi wisatawan. Organisasi bisa merupakan sebuah perusahaan atau organisasi masyarakat dimana akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Organisasi ini mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para stakeholder lainnya.

Dalam Utomo dan Satriawan (2017) bahwa berdasarkan penelitian dan studi dari UNDP/WTO (1981) dan beberapa konsultan, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, yaitu melalui pendekatan pasar dan pendekatan fisik.

1. Pendekatan Pasar, sebagai berikut:

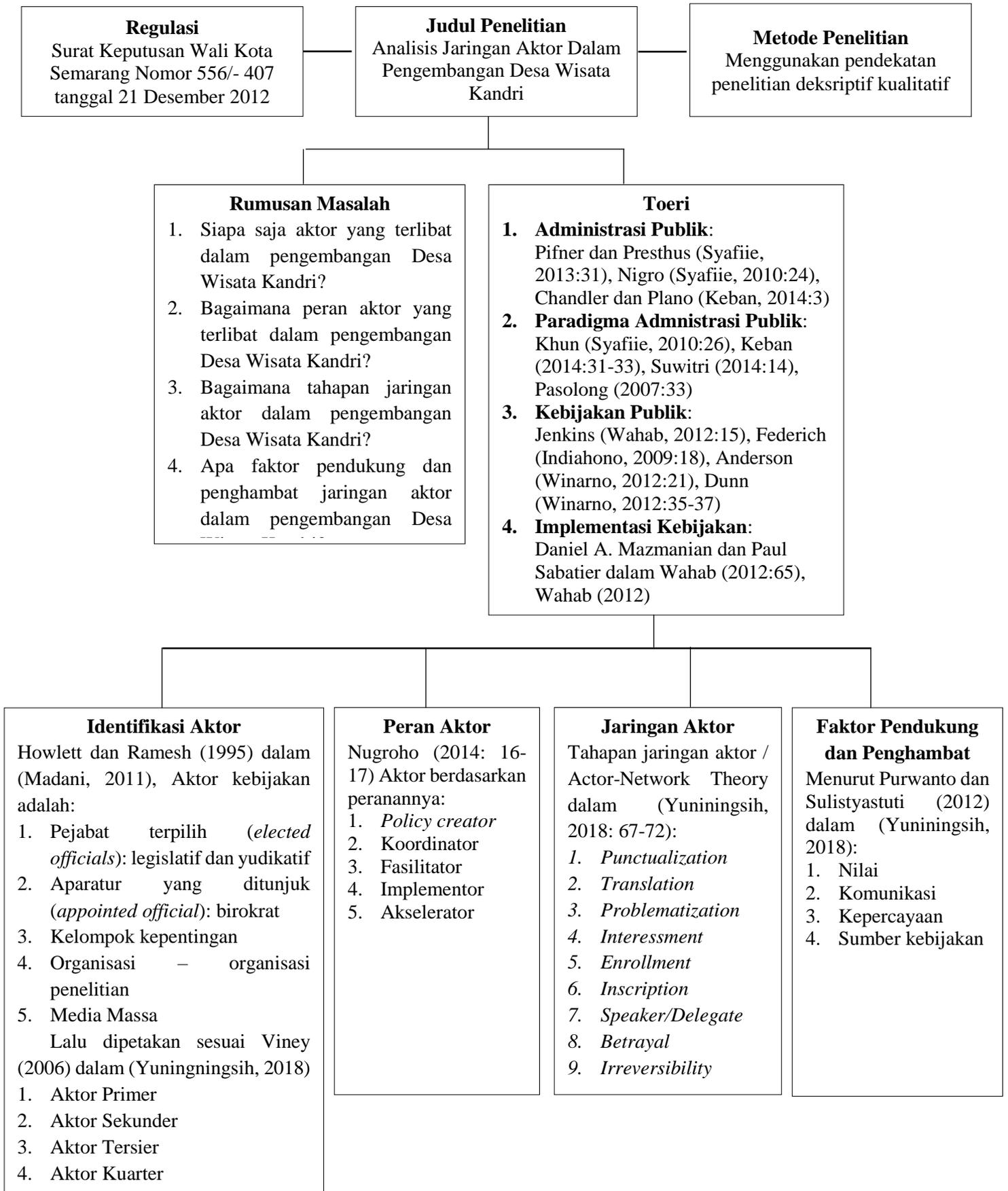
- a) Interaksi tidak langsung adalah model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan;
- b) Interaksi setengah langsung adalah bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk;
- c) Interaksi langsung wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pendekatan Pasar ini diperlukan beberapa kriteria yaitu:

- a) Atraksi wisata;

- b) Jarak tempuh;
 - c) Besaran desa;
 - d) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan;
 - e) Ketersediaan infrastruktur.
2. Pendekatan Fisik, dimana pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.
- a) Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut.
 - b) Mengkonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas wisata.
 - c) Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa yang dioperasikan oleh penduduk desa sebagai industri skala kecil.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Definisi Konsep

1. Identifikasi Aktor

Identifikasi aktor adalah mengidentifikasi dan menilai kepentingan dan pengaruh aktor yang terlibat, yaitu:

- a) Aktor Primer
- b) Aktor Sekunder
- c) Aktor Tersier
- d) Aktor Kwartier

2. Peran Aktor

Peran aktor adalah peran masing-masing aktor yang terlibat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a) *Policy creator*
- b) Koordinator
- c) Fasilitator
- d) Implementor
- e) Akselerator

3. Tahapan Jaringan Aktor

Tahapan jaringan aktor adalah tahapan atas hubungan yang terbentuk antar aktor atas dasar kesamaan kepentingan serta penggabungan kekuatan untuk mencapai kepentingan bersama. Jaringan aktor yang terbentuk dapat diuraikan dalam beberapa tahapan:

- a) *Punctualization*
- b) *Translation*
- c) *Problematization*

- d) *Interessment*
- e) *Enrollment*
- f) *Inscription*
- g) *Speaker/Delegate*
- h) *Betrayal*
- i) *Irreversibility*

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang berpengaruh dan memberikan kontribusi baik positif atau negatif, yaitu:

- a) Nilai,
- b) Komunikasi,
- c) Kepercayaan, dan
- d) Sumber kebijakan.

1.9 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian menjelaskan apa saja yang akan digali peneliti dalam menggambarkan persoalan-persoalan di lapangan sebagai objek penelitian. Fenomena penelitian digunakan agar mempermudah peneliti dalam alur pikir dan penyesuaian teori yang telah dipaparkan oleh peneliti, adapun fenomena dan indikasi yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Fenomena Penelitian

Fonemena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Identifikasi Aktor	Aktor Primer	Pengaruh dan kepentingan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri	Informan: 1. Pokdarwis Pandanaran 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 3. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang 4. Kelurahan Kandri 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah 6. Universitas Negeri Semarang 7. Media AyoSemarang.com.
	Aktor Sekunder		
	Aktor Tersier		
	Aktor Kwarter		
Peran Aktor	<i>Policy Creator</i>	Pihak yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan.	
	Koordinator	1. Pihak yang menjadi koordinator dalam pengembangan Desa Wisata Kandri 2. Sejauh mana koordinasi dengan stakeholder lain. 3. Bentuk kerjasama yang dilakukan	
	Fasilitator	1. Pihak yang memfasilitasi 2. Bentuk fasilitas yang disediakan 3. Kepada siapa fasilitas diperuntukan	
	Implementor	Para pelaku pelaksana proses pengembangan Desa Wisata Kandri	
	Akselerator	Pihak yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi dalam perlindungan perempuan	
	<i>Punctualization</i>	1. Menentukan jaringan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri 2. Menentukan aktor utama dan aktor pendukung	
	<i>Translation:</i>	1. Menentukan dan mendiskripsikan keinginan aktor utama dan aktor pendukung 2. Menyesuaikan keinginan aktor pendukung dengan aktor utama, dan menentukan pokok permasalahan	

Fonemena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Tahapan Jaringan Aktor		3. Menentukan kepentingan masing – masing, serta menentukan peran aktor	
	<i>Problematization</i>	1. Aktor utama mendeskripsikan dan memahami kepentingan aktor lainnya 2. Menjadikan aktor utama sebagai acuan/pusat pertimbangan	
	<i>Interessment</i>	Aktor utama meyakinkan aktor pendukung untuk menerima definisi permasalahan, cara menyelesaikan bagaimana melaksanakan, tempat dan waktu untuk mencapai tujuan dan setiap aktor mendapatkan hak dan kewajiban serta kesepakatan lainnya	
	<i>Enrollment</i>	Aktor pendukung dalam jaringan menerima/ menyelaraskan dengan kepentingan yang diterapkan untuk mereka oleh aktor utama dan terbentuk satu jaringan baru yang mempunyai satu permasalahan yang sama dan kesepakatan lainnya	
	<i>Inscription</i>	Mencetak artefak/ symbol/ perjanjian yang akan menjamin kepentingan masing – masing aktor baik lisan/ tulisan	
	<i>Speaker/Delegate</i>	1. Memahami perbedaan aktor utama/ aktor pendukung/ juru bicara 2. Jaringan memutuskan kapan dan dimana serta pada tingkatan apa aktor tersebut dapat menjadi juru bicara	
	<i>Betrayal</i>	Keadaan dimana aktor tidak mematuhi perjanjian yang dapat dilihat dari partisipasi wakil – wakil mereka	
	<i>Irreversibility</i>	Tingkatan selanjutnya yang memungkinkan untuk kembali ke titik dimana kemungkinan alternatif masih ada	

Fonemena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Faktor Pendukung dan Penghambat	Nilai	Berasal dari individu, organisasi, professional, legal, dan kepentingan umum yang ada dan dibawa oleh masing – masing aktor	
	Komunikasi	1. Seberapa intens/sering antar aktor saling berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama 2. Media apa yang dipakai ketika berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dalam rangka mencapai tujuan/kepentingan bersama	
	Kepercayaan	Kepercayaan dari masing – masing aktor dalam menjalin hubungan dengan aktor lain	
	Sumber Kebijakan	Kebijakan atau regulasi yang mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk	

Sumber: diolah penulis, 2020

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) sebagai berikut ini:

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Meninjau dari teori-teori di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Penelitian ini masuk ke dalam rumpun penelitian sosial yang mengharuskan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan para aktor yang terlibat. Oleh sebab itu data-data yang akan digunakan dalam analisis bersifat kualitatif, mengingat peneliti dalam hal ini ingin memperoleh

gambaran mendalam tentang jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

1.10.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berlangsung dalam situasi alamiah yang terjadi dalam sebuah lokus, artinya peneliti tidak melakukan manipulasi latar penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil lokus penelitian di Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Lokasi penelitian yang sudah diidentifikasi bahwa ketersediaan data untuk dilakukannya penelitian dapat dilakukan dengan baik. Pihak berwenang dan yang berhubungan langsung dengan penelitian telah memberikan persetujuan atas lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Fokus penelitian kualitatif disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proposisi dibangun dari fenomena penelitian tentang jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Kandri di Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai informan dalam memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2017:165-166), seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena dianggap bahwa seseorang atau kelompok tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka penulis dapat menentukan subyek penelitian (Sugiyono, 2017). Adapun informan dari penelitian ini yaitu

aktor yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam terkait dengan pengembangan Desa Wisata Kandri. Pertimbangan pemilihan dari setiap aktor ini karena informan yang penulis tentukan merupakan orang-orang yang menurut penulis memiliki informasi dan paham betul mengenai topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa subjek yang dijadikan sebagai informan terkait pengembangan Desa Wisata Kandri, yaitu Pokdarwis Pandanaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kelurahan Kandri, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, .

Setelah dilakukan penelitian di lapangan terjadi penambahan informan supaya informasi yang didapatkan lebih detail, maka peneliti menggunakan teknik *snowball*, yaitu apabila informan yang ada belum memberikan data atau informasi yang lengkap maka akan berlanjut kepada informan-informan lain sehingga data atau informasi yang didapatkan semakin lengkap. Beberapa usaha dalam menentukan informan yaitu melalui keterangan pihak tertentu yang berwenang, melalui wawancara pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana informan memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini informan yang dipilih menggunakan teknik ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan Media AyoSemarang.com

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2017:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber tertulis, kata-kata dan tindakan, foto dan data statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tentang jaringan aktor pengembangan Desa Wisata Kandri terdiri dari:

1. Menurut Azwar (2013:91) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen dan hasil wawancara langsung dengan aktor terkait dengan pengembangan Desa Wisata Kandri di Kota Semarang.
2. Menurut Azwar (2013:91) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer, diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek peneliti. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dilihat dari sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Terkait dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel-artikel di media cetak seperti koran, surat kabar online dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Moleong (2017:125) observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.

2. Wawancara/Interview

Menurut Sugiyono (2017:188), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dan bertatap muka secara langsung kepada Pokdarwis Pandanaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, Kelurahan Kandri, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disproapar) Jawa Tengah, Universitas Semarang, Media AyoSemarang.com.

Diusahakan peneliti mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat membantu dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh cukup valid dan lengkap.

3. Metode Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2017:188), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini akan peneliti gunakan sebagai alat penguat data yang diperoleh dari narasumber/ informan berupa foto atau hal-hal lain seperti tulisan yang terkait dengan dokumentasi dan berisi tentang beberapa kegiatan yang dilakukan.

4. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, menganalisis, dan membuat catatan dari buku yang di perlukan, seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2017:244), analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman dalam Bungin (2012:69-70), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperoleh dan didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses

pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

1.10.7 Kualitas Data atau Validitas Data

Dalam menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid dan berkualitas. Menurut Sugiyono (2017:267), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Validitas data sangat diperlukan di dalam suatu penelitian, karena validitas ini dapat dipergunakan untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh di lapangan. Untuk mengetahui validitas informasi mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Sugiyono (2017) terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Validitas data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Moleong (2017:330-331) triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda.

Peneliti dalam hal ini mengecek derajat kepercayaan sumber dari hasil informan yang berbeda karena untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dibutuhkan informan yang beragam sehingga nantinya hasil yang didapat pun tidak hanya dari satu perspektif saja melainkan dimungkinkan untuk melihat suatu fenomena pada penelitian ini dalam kaca mata atau perspektif yang berbeda.